

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 126 TAHUN 1952.

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa jang bernama tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini mempunyai sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;

Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Portama : Maroka, jang bernama tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut, dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah;

Kedua : Dengan menjampaike daftar riwayat pekerjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerja sementara.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai,
3. Kementerian Keuangan,
4. Kementerian Dalam Negeri,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
6. Kantor Penetapan Pajak,
7. Djawatan Perdjalan Negeri,
8. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd. MOHAMMAD ROEM

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratminto

DAFTAR

KEMENTERIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 126 TAHUN 1952.

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pego- wai Negeri te- tap berdasarkan kan	Gadja pada tanggal di- anggap te- tap menurut P.P. 59/1951	Keterangan lain
1	2	3	4	5	6
1	Mr. SUMARNAN (28-5-1916)	Sekretaris Jenderal pa- da Kementeri- an Dalam Ne- gori (6/f).	P.P. No. 50/1949 pasal 21 ayat 1 sub A.	1 Januari 1950.	
2	T. SUMITRO KOLOPAKING PURBONEGGRO (14-6-1887)	Gubernur di- perbantukan pada Kement- erian Dalam Negeri. (6/f).	"	1 Januari 1950.	
3	T. DJANU ISMADI	Pegawai Ting- gi diperbant- ukan pada Kementrian Dalam Negeri. (6/f).	"	1 Januari 1950.	
4	Mr. I. GUSTI KRUT PUDJA (19-5-1908).	Gubernur di- perbantukan pada Kement- erian Dalam Negeri. (6/f)	"	1 Januari 1950.	

DJAKARTA, 4 Juni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd. MOHAMMAD ROEM

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

Mr. Ratmoko